

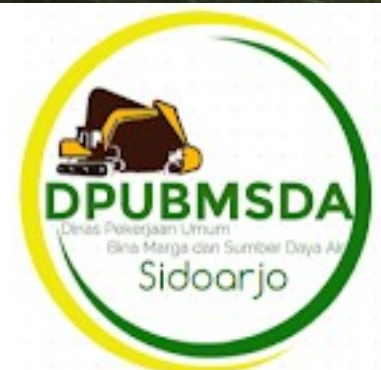


RENJA

RENCANA KERJA

TAHUN 2023 PERUBAHAN

DINAS PU BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR





PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
DAN SUMBER DAYA AIR

JL. SULTAN AGUNG NO. 17 A SIDOARJO
Telepon. (031) 8921942
Email : pubmsda@gmail.com Website : pubmsda.sidoarjokab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PU BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : 050/968/438.5.3/2023
TENTANG
PENGESAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PU BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PU BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja (Renja);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu disusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402),
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136) ;
10. Peraturan Presiden

10. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 90);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
18. Permendagri No. 86 Tahun 2017 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Daerah....

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 2 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 63);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo
22. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo;
23. Surat Edaran Bupati Sidoarjo Nomor:050/5793/438.6.1/2023 tanggal 6 Juni 2023 tentang Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Pengesahan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023.
- KEDUA** : Daftar Rencana Kerja Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tercantum dalam dokumen Renja dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

- KETIGA : Rencana Kerja Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 yang telah disahkan menjadi Pedoman dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023.
- KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan Belanja Kegiatan Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo pada proses pembahasan di DPRD, maka Renja Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air disesuaikan dan ditetapkan kembali oleh Kepala Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : S I D O A R J O

Pada Tanggal : 16 Juni 2023

**KEPALA DINAS PU BINA MARGA DAN SUMBER
DAYA AIR
KABUPATEN SIDOARJO**



Ditandatangani secara elektronik oleh

DWI EKO SAPTONO, S. Sos, MM. MT

NIP. 197002211990031002

DWI EKO SAPTONO. S.Sos.. MM . MT

Pembina Tk I

NIP. 197002211990031002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan karunia-Nya, Rencana Kerja Perubahan (RENJA) Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 telah dapat diselesaikan. Rencana Kerja (RENJA) Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 ini merupakan rencana kerja tahunan dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Sidoarjo.

Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada tahun 2023 disamping mengoptimalkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah berjalan juga merupakan tahun kelima dari pelaksanaan Matriks Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air 2016-2021 (Review). Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 terdiri dari Pendahuluan; Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023; Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah serta Penutup.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen perencanaan OPD yang memuat kebijakan dan program / kegiatan / sub kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan II Tahun 2023. Melalui Perubahan Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah, masyarakat maupun institusi terkait.

Sidoarjo, 16 Juni 2023

**KEPALA DINAS PU BINA MARGA DAN SUMBER
DAYA AIR
KABUPATEN SIDOARJO**



Ditandatangani secara elektronik oleh

DWI EKO SAPTONO, S. Sos, MM. MT
NIP. 197002211990031002

DWI EKO SAPTONO. S.Sos.. MM . MT
Pembina Tk I
NIP. 197002211990031002

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
BAB II	EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023	5
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	2 0
BAB IV	PENUTUP	2 8

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Dalam rangka penyesuaian perkembangan ekonomi makro di Kabupaten Sidoarjo, khususnya di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo, beberapa hal yang terkait dengan asumsi-asumsi dasar ekonomi mengalami perubahan sehingga perlu disusun Perubahan RKPD Tahun 2023. Asumsi-asumsi dasar tersebut antara lain terjadi perubahan pendapatan daerah yang diikuti dengan perubahan belanja daerah dalam APBD Tahun 2023. Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (Perubahan RKPD) adalah Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air ini mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026 dan Hasil Pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan (sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017 pasal 346 dan pasal 360);
2. Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk menyesuaikan alokasi belanja dengan kemampuan keuangan daerah serta memastikan pencapaian Visi, Misi, 17 (tujuh belas) Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati, Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD) RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026;
3. Renja Perubahan Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan/ sub kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2023.

Mengingat arti strategis Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Perubahan Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Surat Edaran Bupati Sidoarjo Nomor:050/5793/438.6.1/2023 tanggal 6 Juni 2023 tentang Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. serta Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik-Bangkalan-MojokertoSurabaya- Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 -2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 8 Seri D);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Pengendalian Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 14 Seri D);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dearah Kabupaten Sidoarjo;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 109);
 22. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo;
 23. Surat Edaran Bupati Sidoarjo Nomor:050/5793/438.6.1/2023 tanggal 6 Juni 2023 tentang Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Perubahan Rencana Kerja adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan Tahun 2023 dan perencanaan program/ kegiatan / sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023. Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja OPD adalah untuk memasukkan program / kegiatan / sub kegiatan yang ada di Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA- PPAS) Perubahan Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2023

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) Tahun 2023 Triwulan I Tahun 2023 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 2.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Triwulan I Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo berikut ini :

						Peralatan dan Mesin Lainnya				0,0 0,0 0		0,0 0,0 0		226.582.0 00,00,00		243.11 8.000, 00,00		0,00,00		0,0 0,0 0		0,0 0,0 0		243.118. 000,00,0 0		7 %		243.118. 000,00,0 0		0 %			
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya jasa penunjang administrasi perkantoran	%	100	Rp 0,0 0,0 0	0	Rp 0,0 0,0 0	100	Rp 3.616.010. 496,00,00	10 0	Rp 441.56 3.154, 00,00	0	Rp 0,00,00	0	Rp 0,0 0,0 0	0	Rp 0,0 0,0 0	10 0	Rp 441.563. 154,00,0 0	100%	12 %	10 0	Rp 441.563. 154,00,0 0	10 0 %	0%		
								Nilai SKM	skor	90		0	90		95 ,4 6			0		0	0			95 ,4 6		100%		95 ,4 6		10 0 %			
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	5	Rp 0,0 0,0 0	0	Rp 0,0 0,0 0	5	Rp 62.756.89 6,00,00	1	Rp 11.500 .000,0 0,00	0	Rp 0,00,00	0	Rp 0,0 0,0 0	0	Rp 0,0 0,0 0	1	Rp 11.500.0 00,00,00	20%	18 %	1	Rp 11.500.0 00,00,00	20 %	0%		
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	Rp 0,0 0,0 0	0	Rp 0,0 0,0 0	4	Rp 691.000.0 00,00,00	1	Rp 99.617 .116,0 0,00	0	Rp 0,00,00	0	Rp 0,0 0,0 0	0	Rp 0,0 0,0 0	1	Rp 99.617.1 16,00,00	25%	14 %	1	Rp 99.617.1 16,00,00	25 %	0%		
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Laporan	12	Rp 0,0 0,0 0	0	Rp 0,0 0,0 0	12	Rp 2.862.253. 600,00,00	1	Rp 330.44 6.038, 00,00	0	Rp 59.310.8 19,00,00	0	Rp 0,0 0,0 0	0	Rp 0,0 0,0 0	1	Rp 389.756. 857,00,0 0	8%	13 %	1	Rp 389.756. 857,00,0 0	8 %	0%		

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH

Rumusan Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo terlihat pada tabel sebagai berikut:

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)						
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target				
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
1																						
1	03																					
1	03	01																				
1	03	01	2.01																			
1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap		100 persen	100 persen	0 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	91 persen	91 persen	6,500,000	6,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	100 persen	0
1	03	01	2.02																			
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap		100 persen	100 persen	119 Orang/bulan	119 Orang/bulan	91 %	91 %	14,879,143,124	14,883,893,124	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	100 persen	19,115,665,499
1	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap		100 persen	100 persen	0 Laporan 1 Laporan	0 Laporan 1 Laporan	91 %	91 %	4,750,000	4,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	100 persen	5,225,000
1	03	01	2.05																			
1	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap		100 persen	100 persen	100 Orang	100 Orang	91 %	91 %	185,000,000	185,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	100 persen	275,000,000
1	03	01	2.06																			
1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap		100 persen	100 persen	21 Paket	21 Paket	91 persen	91 persen	90,017,965	90,017,965	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	100 persen	218,768,914
1	03	01	2.06	02	Penyediaan	Tingkat kepuasan	Jumlah Paket Peralatan dan	Persentase jalan		100 persen	100 persen	7 Paket	7 Paket	91 persen	91 persen	241,764,737	241,764,737	PENDAPATAN		Tingkat	100 persen	282,432,928

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Perlengkapan Kantor yang Disediakan	kabupaten dalam kondisi mantap										ASLI DAERAH (PAD)		kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan				
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap		100 persen	100 persen	1 Paket	1 Paket	91 persen	91 persen	743,000,000	743,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	100 persen	712,095,616		
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap		100 persen	100 persen	13 Paket	13 Paket	91 persen	91 persen	78,801,305	78,801,305	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	100 persen	79,174,200		
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap		100 persen	100 persen	3 Dokumen	3 Dokumen	91 persen	91 persen	8,880,000	8,880,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	100 persen	3,720,000		
1.03.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap		100 persen	100 persen	29 Paket	29 Paket	91 persen	91 persen	66,345,992	66,345,992	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	100 persen	279,231,921		
1.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap		100 persen	100 persen	12 Laporan	12 Laporan	91 persen	91 persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	100 persen	450,500,000		
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap		100 persen	100 persen	1 Laporan	1 Laporan	91 persen	91 persen	1,109,113,571	1,259,113,571	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	100 persen	561,710,970		
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												251,506,020	347,171,815			0			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap		100 persen	100 persen	9 Unit	9 Unit	91 persen	91 persen	251,506,020	347,171,815	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	100 persen	0
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										3,620,286,186	3,620,286,186				4,319,517,750		
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap		100 persen	100 persen	12 Laporan	12 Laporan	91 persen	91 persen	63,232,586	63,232,586	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	100 persen	12,528,950
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap		100 persen	100 persen	12 Laporan	12 Laporan	91 persen	91 persen	691,000,000	691,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	100 persen	1,335,000,000
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap		100 persen	100 persen	12 Laporan	12 Laporan	91 persen	91 persen	2,866,053,600	2,866,053,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	100 persen	2,971,988,800
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1,324,784,000	2,015,336,000				2,964,000,000		
1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap		100 persen	100 persen	10 Unit	10 Unit	91 persen	91 persen	310,000,000	310,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	100 persen	425,000,000
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap		100 persen	100 persen	4 Unit	4 Unit	91 persen	91 persen	265,000,000	265,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	100 persen	265,000,000
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap		100 persen	100 persen	5 Unit	5 Unit	91 persen	91 persen	749,784,000	1,440,336,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat kepuasan aparatur perangkat	100 persen	2,274,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024										
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)							
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target								
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah						
		kesekretariatan													daerah terhadap pelayanan kesekretariatan									
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)												20,309,672,500							
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota												20,309,672,500							
1	03	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Persentase Saluran Irigasi dalam kondisi baik	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	Persentase kecukupan kebutuhan air irigasi.		89 persen	89 persen	47 Dokumen	47 Dokumen	88 persen	88 persen	1,097,367,460	1,178,007,460	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Saluran Irigasi dalam kondisi baik	89 persen	1,593,625,000		
1	03	02	2.02	02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase Saluran Irigasi dalam kondisi baik	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	Persentase kecukupan kebutuhan air irigasi.		89 persen	89 persen	1.1 KM	1.1 KM	88 persen	88 persen	1,240,000,000	1,610,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Saluran Irigasi dalam kondisi baik	89 persen	6,719,000,000		
1	03	02	2.02	08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase Saluran Irigasi dalam kondisi baik	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Persentase kecukupan kebutuhan air irigasi.		89 persen	89 persen	25 KM	25 KM	88 persen	88 persen	9,500,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Saluran Irigasi dalam kondisi baik	89 persen	2,627,311,500		
1	03	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase Saluran Irigasi dalam kondisi baik	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Persentase kecukupan kebutuhan air irigasi.		89 persen	89 persen	1.1 KM	1.1 KM	88 persen	88 persen	380,000,000	210,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Saluran Irigasi dalam kondisi baik	89 persen	630,000,000		
1	03	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase Saluran Irigasi dalam kondisi baik	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Persentase kecukupan kebutuhan air irigasi.		89 persen	89 persen	80 KM	80 KM	88 persen	88 persen	6,729,028,785	7,466,856,298	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Saluran Irigasi dalam kondisi baik	89 persen	6,739,736,000		
1	03	02	2.02	27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Persentase Saluran Irigasi dalam kondisi baik	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Beroperasi	Persentase kecukupan kebutuhan air irigasi.		89 persen	89 persen	4 Unit	4 Unit	88 persen	88 persen	4,109,979,420	3,100,332,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Saluran Irigasi dalam kondisi baik	89 persen	0		
1	03	02	2.02	28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Persentase Saluran Irigasi dalam kondisi baik	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	Persentase kecukupan kebutuhan air irigasi.		89 persen	89 persen	18 DI	18 DI	88 persen	88 persen	149,947,500	149,947,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Saluran Irigasi dalam kondisi baik	89 persen	2,000,000,000		
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE																			
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota																			
1	03	06	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Saluran Drainase yang ditingkatkan dan dipelihara	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	Persentase luasan genangan/ banjir tertangani		27 persen	27 persen	47 Dokumen	47 Dokumen	69 persen	69 persen	2,781,125,000	2,860,295,393	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Saluran Drainase yang ditingkatkan dan dipelihara	27 persen	2,823,453,400		
1	03	06	2.01	04	Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Saluran Drainase yang ditingkatkan dan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan	Persentase luasan genangan/ banjir tertangani		27 persen	27 persen	100 Orang	100 Orang	69 persen	69 persen	1,276,902,067	1,456,902,067	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Saluran Drainase yang	27 persen	0		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah				
		dipelihara												ditingkatkan dan dipelihara				
1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Saluran Drainase yang ditingkatkan dan dipelihara	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	Persentase luasan genangan/ banjir tertangani		27 persen	27 persen	1100 M	1100 M	69 persen	69 persen	15,907,000,000	15,907,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Saluran Drainase yang ditingkatkan dan dipelihara	27 persen	4,356,000,000	
1.03.06.2.01.06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Persentase Saluran Drainase yang ditingkatkan dan dipelihara	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	Persentase luasan genangan/ banjir tertangani		27 persen	27 persen	4400 M	4400 M	69 persen	69 persen	13,607,000,000	13,817,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Saluran Drainase yang ditingkatkan dan dipelihara	27 persen	16,540,700,000	
1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Persentase Saluran Drainase yang ditingkatkan dan dipelihara	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	Persentase luasan genangan/ banjir tertangani		27 persen	27 persen	2200 m	2200 m	69 persen	69 persen	2,390,000,000	2,600,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Saluran Drainase yang ditingkatkan dan dipelihara	27 persen	6,792,500,000	
1.03.06.2.01.08	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Saluran Drainase yang ditingkatkan dan dipelihara	Jumlah Sarana Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	Persentase luasan genangan/ banjir tertangani		27 persen	27 persen	5 Unit	5 Unit	69 persen	69 persen	554,848,770	606,648,770	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Saluran Drainase yang ditingkatkan dan dipelihara	27 persen	546,396,037	
1.03.06.2.01.09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Persentase Saluran Drainase yang ditingkatkan dan dipelihara	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	Persentase luasan genangan/ banjir tertangani		27 persen	27 persen	1100 M	1100 M	69 persen	69 persen	19,780,535,072	20,130,535,072	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Saluran Drainase yang ditingkatkan dan dipelihara	27 persen	0	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN											271,054,656,558	284,320,394,058			349,342,419,215		
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota											271,054,656,558	284,320,394,058			349,342,419,215		
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan kabupaten Sidoarjo dalam kondisi mantap	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap		90.3 persen	90.3 persen	13 Dokumen	13 Dokumen	91 persen	91 persen	882,500,000	882,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase jalan kabupaten Sidoarjo dalam kondisi mantap	90.3 persen	1,291,045,226	
1.03.10.2.01.02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan kabupaten Sidoarjo dalam kondisi mantap	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap		90.3 persen	90.3 persen	12168 M ²	12168 M ²	91 persen	91 persen	97,000,000,000	93,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase jalan kabupaten Sidoarjo dalam kondisi mantap	90.3 persen	0	
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	Persentase jalan kabupaten Sidoarjo dalam kondisi mantap	Panjang Jalan yang Dibangun	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap		90.3 persen	90.3 persen	1.65 KM	1.65 KM	91 persen	91 persen	52,225,500,000	56,225,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase jalan kabupaten Sidoarjo dalam kondisi mantap	90.3 persen	57,200,000,000	
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	Persentase jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan	Persentase jalan		90.3 persen	90.3 persen	38 KM	38 KM	91 persen	91 persen	95,203,868,766	98,737,606,266	PENDAPATAN	Persentase	90.3 persen	245,111,781,365	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah				
		kabupaten Sidoarjo dalam kondisi mantap	Rekonstruksi Jalan	kabupaten dalam kondisi mantap									ASLI DAERAH (PAD)		jalan kabupaten Sidoarjo dalam kondisi mantap			
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Persentase jalan kabupaten Sidoarjo dalam kondisi mantap	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap		90.3 persen	90.3 persen	209 KM	209 KM	91 persen	91 persen	22,168,537,792	31,900,537,792	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jalan kabupaten Sidoarjo dalam kondisi mantap	90.3 persen	41,217,911,504
1.03.10.2.01.16	Penggantian Jembatan	Persentase jalan kabupaten Sidoarjo dalam kondisi mantap	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap		90.3 persen	90.3 persen	1000 M	1000 M	91 persen	91 persen	3,530,000,000	3,530,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jalan kabupaten Sidoarjo dalam kondisi mantap	90.3 persen	0
1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	Persentase jalan kabupaten Sidoarjo dalam kondisi mantap	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap		90.3 persen	90.3 persen	200 M	200 M	91 persen	91 persen	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jalan kabupaten Sidoarjo dalam kondisi mantap	90.3 persen	3,465,000,000
1.03.10.2.01.22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Persentase jalan kabupaten Sidoarjo dalam kondisi mantap	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap		90.3 persen	90.3 persen	10 Dokumen	10 Dokumen	91 persen	91 persen	7,125,000	7,125,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jalan kabupaten Sidoarjo dalam kondisi mantap	90.3 persen	422,125,000
1.03.10.2.01.23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Persentase jalan kabupaten Sidoarjo dalam kondisi mantap	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap		90.3 persen	90.3 persen	10 Dokumen	10 Dokumen	91 persen	91 persen	37,125,000	37,125,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase jalan kabupaten Sidoarjo dalam kondisi mantap	90.3 persen	634,556,120
TOTAL												363,677,783,532	378,960,030,213					429,978,183,950

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Tahun 2021-2026. Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan baik pada skala Pemerintahan Kabupaten, jangka menengah ataupun jangka panjang. Rencana Kerja ini memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Tahun 2023, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD. Perubahan Renja Tahun 2023 ini juga tercantum Hasil Pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Dengan tersusunnya Perubahan Renja Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Sidoarjo. Selain itu juga mewujudkan tujuan Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air yaitu **“Tersedianya infrastruktur kebinamargaan dan sumber daya air yang berkualitas dan merata “**, dengan sasaran yang akan dipergunakan sebagai landasan perencanaan program/kegiatan dalam tahun 2019-2024 yaitu: (1) Tersedianya infrastruktur sumber daya air yang berkualitas dan merata, dan (2) Tersedianya infrastruktur kebinamargaan yang berkualitas dan merata.

Sidoarjo, 16 Juni 2023

KEPALA DINAS PU BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN SIDOARJO



Ditandatangani secara elektronik oleh

DWI EKO SAPTONO, S. Sos, MM. MT
NIP. 197002211990031002

DWI EKO SAPTONO. S.Sos.. MM . MT
Pembina Tk I
NIP. 197002211990031002